

Abstract

Reformasi in 1998 brought about two most important changes for Indonesia as a nation. The first was democracy and the second, decentralization. Decentralization changed the face of governance in Indonesia by providing local governments with an active role in decision making for the first time in Indonesian history, where amongst other things provision of public services became the main responsibility of local governments.

This paper looks at the district government of Sleman, to find out whether or not it has the capacity to provide public services. The variables selected to gauge public satisfaction are Infrastructure, Education, Health and Environment Services. Forty individuals were randomly selected from four locations in *Condong Catur* and the departments of KIMPRASWIL (infrastructure), health and education are taken as local government performance indicators. This paper also briefly compares these public services before and after decentralization came into effect in 2001.

Local government capacity is assessed in terms of administrative, policy and state capacity. State capacity assesses the position of the State in the provision of public services after decentralization, whereas administrative capacity refers to local government management, in terms of efficiency and effectiveness. Policy capacity is the capacity of existing policies to incorporate desired changes in local governments and obtain development objectives.

In conclusion, apparently inadequate administrative capacity is undermining department performance. Human resource management is the biggest administrative challenge as there is an excess of unskilled workers and a lack of skilled workers and Mind-set of civil servants is an issue with no effective performance management system in place. Furthermore, the organizational culture is still top-down in spite of policy changes to the contrary and this creates bureaucratic bottlenecks that are one of the underlying reasons for inefficiency in government departments.

The Indonesian public thus perceives government as unreliable; as there is no proper welfare or distribution system in place. Poor socialization of policies adds to this problem along with corruption and ineffective communication and coordination channels. Therefore, the low quality of public services is due to the administrative incapacity and mismanagement rather than financial and resource constraints as is often assumed.

Keywords: *Local Government, Decentralization, Policy capacity, Administrative capacity, State capacity, Public Services*

Intisari

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan yang berarti bagi Indonesia sebagai Negara. Perubahan itu adalah sistem demokrasi dan sistem pemerintahan desentralisasi. Dua konsep ini menjadi perubahann besar dan dynamik bagi pemerintahan di Indonesia. Untuk pertama kalinya disepanjang sejarah Indonesia, pemerintah lokal berperan dalam pengambilan keputusan penting dalam menyediakan pelayanan umum pada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pemerintah kabupaten Sleman mempunyai kapasitas yang baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Sleman. Variabel-variabel yang dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di Sleman adalah melalui pelayanan infrastruktur, Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lingkungan. Sampel yang dipilih secara random dari masyarakat Condong Catur terdiri dari 40 orang yang dipilih dari wilayah Condong Catur. Dari sisi pemerintah lokal variabel yang dipilih adalah DINAS KIMPRASWIL, DINAS Kesehatan dan Dinas Pendidikan.. Penelitian ini juga membandingkan pelayanan umum yang tersedia sebelum dan sesudah desentralisasi.

Kapasitas pemerintah lokal dilihat dari segi sistem administrasi dan dari segi sistem kebijakan, sedangkan pada kapasitas pemerintah pusat yaitu dari segi pelayanan umum. Definisi Kapasitas pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah pusat dalam memonitor aktivitas pemerintah lokal dan memastikan pelayanan umum yang tersedia. Definisi Kapasitas Administrasi yaitu kapasitas manajemen dari sisi efisiensi dan efektivitas. Sedangkan Kapasitas kebijakan adalah kapasitas kebijakan dalam membuat perubahan pada sistem administrasi Negara dalam mencapai tujuan.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini muncul beberapa hal yang menarik dan mungkin tidak terlalu diperhatikan yaitu walaupun sudah ada beberapa kemajuan dalam bidang kebijakan. Masalah umum adalah kekurangan dalam bidang administrasi yang tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjalani administrasi negara. Tambahan lagi pemikiran pegawai negeri rata-rata masih sama seperti dulu, budaya dan kinerja pemerintahan masih melalui pola atasan bawahan walupun secara bijakan yang sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Masalah-masalah ini mengurangi efek kemajuan lain.

Selain itu kelemahan lain adalah sistem birokrasi yang rumit. Dari sisi masyarakat, pemerintah belum mampu menolong karena tidak ada sistem distribusi yang tepat yang bisa mensejahterakan kebutuhan masyarakat miskin. Selain dari itu kelemahan lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dan adanya korupsi serta kurangnya kesempatan berdiskusi membuat hambatan semakin besar dalam komunikasi, koordinasi dan membuat keputusan penting.

Kata Kunci: Kapasitas Pemerintah Lokal; kapasitas kebijakan; kapasitas pemerintah pusat, pelayanan umum